

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur salah satu bagian proses perkembangan dan transformasi yang diarahkan melalui perencanaan sistematis berguna untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur penunjang kehidupan manusia. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur khususnya bendungan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menjaga ketahanan pangan nasional guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur sendiri merupakan sistem pendukung bagi tatanan sosial dan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara manusia dan lingkungan, yang pada akhirnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan (Robert J. Kodoatie, 2005).

Menurut Notohadiprawiro et al. (2006) Bendungan adalah salah satu bentuk infrastruktur penting yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Keberadaan waduk memungkinkan penampungan air hujan dalam jumlah cukup pada musim penghujan, yang kemudian dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Air merupakan sumber daya alam esensial yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari (Kodoatie et al., 2010).

Salah satu bendungan yang dibangun dalam konteks PSN adalah Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan semantok tercatat menjadi yang paling Panjang di antara negara-negara di Asia Tenggara, dengan kapasitas tampung air sebesar 32,67 juta m³ dan area genangan seluas 365 hektare, bersumber dari aliran Sungai Semantok. Bendungan ini dirancang untuk mengairi 1.900 hektar lahan pertanian, mereduksi risiko banjir hingga 137 m³/detik di kawasan hilir Kecamatan Rejoso, serta menyediakan air bersih bagi sekitar 143.000 jiwa di Kecamatan Rejoso dan Nganjuk.

Fenomena kekeringan dan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso menjadi latar belakang utama pembangunan bendungan ini. Pada musim kemarau, wilayah ini kerap mengalami kesulitan air bersih, sementara pada musim penghujan, luapan sungai sering mengakibatkan banjir yang merendam permukiman warga. Oleh karena itu, pembangunan Bendungan Semantok diharapkan mampu mengatasi dua masalah tersebut secara bersamaan: menampung air hujan berlimpah dan menyalurkannya saat musim kemarau. Selain fungsi irigasi dan pengendalian banjir, bendungan ini juga diproyeksikan menjadi sumber ekonomi baru. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan Bendungan Semantok turut membawa dampak negatif, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh relokasi. Salah satu dampak utamanya adalah hilangnya lahan pertanian, yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga (Setyohadi, B. S., & Budiyanto, E. (2022).

Menurut Hadjisarosa (1974, dan Lutfi, 2006), tingkat kesejahteraan suatu wilayah dapat diukur melalui “tingkat kemudahan” masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat kemudahan tersebut, semakin tinggi pula daya tarik suatu wilayah dalam mengembangkan sumber daya ekonominya. Pembangunan bendungan, seperti halnya proyek besar lainnya, memerlukan lahan yang sangat luas. Dalam konteks Bendungan Semantok, lahan yang digunakan berasal dari lahan milik Perhutani dan masyarakat yang dibebaskan secara resmi. Dampak sosial akibat relokasi ini tentu tidak bisa dihindari. Di satu sisi, pembangunan membuka peluang baru, tetapi di sisi lain, juga memunculkan perubahan sosial dan budaya. Pola hidup masyarakat, struktur pekerjaan, dan hubungan sosial mengalami penyesuaian signifikan.

Dari data yang diperoleh, sekitar 300 hektar lahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan merupakan lahan Perhutani, sedangkan sisanya adalah lahan milik warga. Sebanyak 129 Kepala Keluarga (KK) dari Dusun Kedungpingit dan 77 KK dari Dusun Kedungnoyo harus direlokasi akibat pembebasan lahan tersebut. Sebagian dari mereka menggunakan uang ganti rugi untuk membeli lahan baru, meskipun proses adaptasi terhadap lingkungan dan pekerjaan baru masih menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Sacharosa, G. N., Astuti, H., & Hadi, H. S. (2022) Relokasi masyarakat, meskipun disertai kompensasi berupa uang ganti rugi, tetap menimbulkan berbagai persoalan baru. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan, sebagian besar

warga Desa Sambikerep sebelumnya bekerja sebagai buruh tani di lahan Perhutani dengan sistem bagi hasil yang diatur secara resmi melalui nota kesepahaman (MoU). Pekerjaan ini menjadi sumber utama penghidupan warga selama bertahun-tahun. Namun, setelah relokasi, lahan pertanian tersebut tidak lagi tersedia karena telah menjadi bagian dari area genangan bendungan. Hal ini berdampak langsung pada aspek ekonomi masyarakat, di mana banyak warga kehilangan mata pencaharian dan mengalami penurunan pendapatan. Sebagian dari mereka kini harus mencari pekerjaan baru, seperti menjual kayu atau mencari alternatif penghasilan lain, namun keterbatasan lahan dan minimnya akses ke pusat ekonomi membuat proses adaptasi tidak berjalan mudah.

Dari sisi sarana dan prasarana, meskipun pemerintah telah menyediakan rumah baru, infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, sistem drainase, transportasi umum, serta akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya memadai. Dibutuhkan jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga. Namun demikian, potensi pengembangan wilayah baru tetap terbuka. Bendungan Semantok, selain berfungsi sebagai infrastruktur irigasi dan pengendali banjir, juga diproyeksikan sebagai destinasi wisata unggulan. Pemerintah daerah bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berencana mengelola kawasan ini secara profesional dengan melibatkan warga terdampak sebagai pelaku utama. Sekitar 90% tenaga kerja di sektor wisata dan pengelolaan kawasan direncanakan berasal dari masyarakat

lokal. Peluang ini dapat menjadi titik balik bagi pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca relokasi (Romadhoni, M. A. (2021).

Dengan demikian, pembangunan Bendungan Semantok bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut transformasi sosial-ekonomi masyarakat Desa Sambikerep. Proyek ini perlu diikuti dengan strategi pemberdayaan dan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat terdampak tidak hanya menjadi korban relokasi, tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan wilayah mereka yang baru.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Desa Sambikerep setelah mereka direlokasi akibat pembangunan Bendungan Semantok. Dengan memahami berbagai perubahan dan tantangan yang mereka hadapi, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran yang berguna agar proses relokasi ke depannya bisa lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bentuk pengawasan dari dunia akademik agar pembangunan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial dan melindungi masyarakat yang terdampak, bukan hanya menjadikan mereka sebagai pelengkap pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji, menganalisis, dan menilai dampak relokasi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Desa Sambikerep, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kondisi psikologisnya. Diharapkan penelitian ini dapat membantu memperjelas dan menggambarkan secara lebih mendalam

mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur melalui kualitas hidup masyarakat, serta membantu mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Desa Sambikerep Pasca Relokasi Bendungan Semantok?
2. Bagaimana Upaya Masyarakat Memenuhi Aspek Kesejahteraan Sosial Pasca Relokasi ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran Desa Sambikerep Pasca Relokasi Bendungan Semantok.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Masyarakat Memenuhi Aspek Kesejahteraan Sosial Pasca Relokasi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan implikasi positif, baik secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana dijabarkan berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi partisipasi dalam pengembangan kajian pengetahuan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, pembangunan wilayah, dan studi dampak sosial proyek infrastruktur. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik bagi penelitian lanjutan yang relevan.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Pemerintah atau Pemangku Kepentingan: Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan relokasi yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat Terdampak: Memberikan gambaran mengenai tantangan dan potensi yang dapat dioptimalkan pasca relokasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.
3. Bagi Pengembang Proyek (Kontraktor/Pemerintah Pusat): Menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga bisa menghindari dampak sosial yang merugikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan dalam pelaksanaan studi. Adapun fokus penelitian yang ditetapkan meliputi:

1. Profil Dusun Kedungnoyo, Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
2. Profil Bendungan Semantok Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
3. Kesejahteraan sosial yang diteliti oleh peneliti meliputi kebutuhan sosial dan ekonomi

